

# SEIGNIORAGE DALAM PERSPEKTIF MONETER ISLAM

Oleh: Asyari Hasan\*

Program Studi Perbankan Syariah STAIN Batusangkar  
Jl. Jenderal Sudirman No. 137, Lima Kaum Batusangkar  
e-mail: asyarihasangorat@gmail.com

**Abstract:** *Seigniorage refers to any profits resulting from issuing particular currency. Seigniorage is basically profits made by a country from the initial use of fiat money. As the issuer of a currency, a country gets profits resulting from the differences value of production cost and nominal value stated on the money. On the other hand, to earn some money, citizens need to work hard and spend time. Consequently, there seems to be a gap between what the citizens get and the profits the government makes. Dealing with this phenomena, Islam demands balance and fairness in any forms of economic phenomena, including the production of currency.*

**Kata kunci:** *seigniorage, token, legal tender, float exchange rate, fiat, intrinsik, ekstrinsik, resources*

## PENDAHULUAN

Pemerintahan suatu negara membiayai kebutuhan dan anggaran negaranya, biasanya adalah melalui bantuan, utang atau pinjaman baik dari sumber domestik maupun eksternal. Sedangkan sumber paling meyakinkan untuk memperoleh pendapatan bagi pemerintah adalah melalui proses penciptaan uang primer (Baba and Kenneth, 2013: 20). Melalui monopoli proses penciptaan uang pemerintah memperoleh keuntungan luar biasa. Paham ini didasari oleh teori tentang jumlah uang beredar dalam masyarakat (teori kuantitas uang, *quantity theory of money*) yang kemudian dikenal dengan teori permintaan uang klasik yang dipelopori oleh Irving Fisher. Teori ini menganut paham bahwa otoritas moneter dapat secara lang-

sung mengendalikan uang primer. Sebab dengan beberapa asumsi, seperti adanya asumsi bahwa pengganda uang cukup stabil dan dapat diperkirakan dengan baik maka uang beredar dapat dikendalikan, (McEachern, 2000: 310).

Dengan menciptakan uang, suatu pemerintahan mendapatkan keuntungan yang luar biasa dari *seigniorage*. Dalam sistem *float exchange rate* sekarang, *seigniorage* telah digunakan suatu pemerintahan sebagai sumber pendapatan pemerintah yang sangat besar. (Leen, 2011: 2). Bahkan pendapatan dari mencetak uang ini sudah dimulai sejak mata uang diciptakan tidak sesuai dengan nilainya, ada selisih antara nilai intrinsik dan ekstrinsiknya. *Seigniorage* mengacu pada perbedaan antara nilai nominal koin dan biaya produksi dan penciptaannya. Dalam

---

\* Penulis adalah Lektor dalam Mata Kuliah Manajemen Perbankan Syariah STAIN Batusangkar

sistem ekonomi yang menggunakan uang *fiat*, biaya marjinal dan pencetakan secara efektif adalah nol, (Buiter, 2007: 10.)

Namun *seigniorage* ini didapatkan oleh suatu pemerintahan dengan cara yang dianggap tidak berkeadilan karena negara telah mencuri harta rakyatnya dengan menjadikan uang kertas sebagai alat transaksi sah. Nilai nominal yang juga disebut "nilai *fiat*" yang terdapat pada uang kertas mengacu pada apa yang tertulis di atasnya dan ditentukan oleh kekuasaan negara yang menyatakan itu sah (*legal tender*). Selisih antara ongkos penciptaan uang dengan nilai uang merupakan sesuatu yang tidak adil. Nilai intrinsik yang terkandung dalam mata uang tidak seimbang dengan nilai komoditas yang diduplikasinya. Suatu negara melalui bank sentralnya menciptakan uang atau mata uang dengan ongkos yang sangat murah, sekitar 0,2% dari total nilai yang tertera dalam uang. Artinya dengan nilai yang tidak seimbang 0,2% bank sentral telah mengambil keuntungan 99,8% dari nilai total uang yang diciptakan kemudian diedarkan kepada masyarakat. Sementara di sisi lain masyarakat untuk mendapatkan selebar uang kertas sangat sulit dan butuh bekerja keras. Sebagai contoh dengan menghasilkan uang kertas Rp. 100 dengan biaya Rp. 00,2, negara telah menciptakan uang fiat dengan suatu daya beli senilai Rp. 100 dan *seigniorage* Rp. 99,98%. Semakin besar biaya produksi uang fiat semakin rendah *seigniorage*-nya, (Asyari Hasan, 2014: 94)

Sementara itu kebijakan ekonomi apapun dalam Islam baik moneter maupun mata uang apapun tidak hanya harus sesuai dengan etos Islam

tetapi juga harus membantu mewujudkan tujuan sosio-ekonomi yang dituntun oleh Islam. Dan tujuan yang paling penting adalah kesejahteraan ekonomi dengan pekerjaan penuh dan tingkat optimum pertumbuhan ekonomi, keadilan sosial-ekonomi serta pemerataan pendapatan dan kekayaan, dan stabilitas dalam nilai mata uang yang memungkinkannya sebagai media pertukaran menjadi unit penghitung yang handal. (Chapra, 2012: 2) .

## PRODUKSI MATA UANG

Saat ini produksi mata uang didasarkan pada sistem kapitalisme yang menegaskan kebebasan suatu negara untuk menciptakan uang tanpa intervensi pihak lain tergantung tingkat permintaan akan uang tersebut. Setiap negara diberikan kebebasan seluas-luasnya untuk memproduksi uang. Produsen diberikan ruang yang bebas untuk ekspansi kekayaan melalui hubungan saling menguntungkan. Inilah kemudian yang dibantah oleh Mannan dengan tegas bahwa perilaku produksi tidak hanya menyandarkan pada kondisi permintaan pasar, melainkan juga berdasarkan pertimbangan kemashlahatan, (Mannan, 1986: 276)

Uang kertas bukan lagi hanya sebagai alat untuk media pertukaran namun lebih dari itu adalah untuk kekuatan-kekuatan lain di luar ekonomi. Kebijakan moneter apapun seharusnya dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat. Termasuk dalam segala perubahan yang berhubungan dengan mata uang harus benar-benar memperhatikan segala aspek sosial kemasyarakatan dan

persiapan yang matang. Uang harus digunakan untuk kesejahteraan bagi masyarakat bukan untuk memperkaya segelintir orang. Sebagai sumber daya (*resources*) uang lebih langka daripada air maka uang digunakan harus berdasarkan keadilan dan efisiensi yang optimal. (Chapra, 1996, 327-328).

Ada dua motif di balik penciptaan uang, yang pertama adalah motif kekuasaan dan motif ekonomi, sebagai contoh ini dapat dilihat dari terteraanya berbagai simbol Islam di atas koin yang dicetak di masa lalu. Hal ini pula yang menyebabkan kekaisaran Byzantium begitu kuat menolak keberadaan koin dinar ketika pertama kali dicetak oleh Abdul Malik bin Marwan (685-705 M). Motif kekuasaan juga disebut dengan motif politik seperti uang "fiat" yang peredarannya ditopang oleh tendensi politik suatu negara. Hal ini dibenarkan oleh ekonom moneter terkemuka Jerman, Karl Helfferich bahwa "nilai uang melekat pada dirinya sendiri tanpa terpengaruh oleh regulasi apapun". Berbeda dengan uang kertas dibutuhkan "organisasi pengelolaan" karena uang kertas terbit untuk dikontrol nilainya oleh negara dan tidak terlepas dari fenomena kekuasaan. (Helfferich, 1969: 619-820)

Selain motif kekuasaan, terlihat juga bahwa motif ekonomi sangat berperan di balik pencetakan uang. Salah satu contoh adalah motif pencetakan uang di jaman dahulu, di mana ukuran rasio emas dan perak pada dasarnya merupakan rahasia keuntungan yang selama ini diperoleh Byzantium. Perbedaan rasio berat emas dan perak antara Timur dan Barat pada dasarnya mem-

berikan keuntungan bagi Byzantium saat itu. Rasio antara emas dan perak saat itu dipertahankan antara 7:1 atau 6:1, sedangkan rasio di wilayah Timur sekitar 9:1 sampai 16:1. Hal ini berarti bahwa setiap koin perak Byzantium yang ditukarkan di wilayah Timur akan dihargai sebanyak dua kali lipat lebih banyak seandainya koin tersebut ditukar di Byzantium. Dengan demikian, keuntungan karena adanya perbedaan rasio ini akan dimiliki oleh koin Byzantium. (Ridwan, 2013: 188).

Para ekonom sepakat hampir seluruh negara di dunia menggunakan *seigniorage* untuk mengatasi defisit anggaran negaranya. Penelitian terhadap beberapa negara menunjukkan bahwa faktor politik sangat menentukan besaran *seigniorage*, di mana semakin tidak stabil suatu negara maka semakin tinggi *seigniorage*-nya (Aisen and Vega, 2005: 1). *Seigniorage* menjadi sumber pendapatan unggulan dari suatu pemerintahan dan telah menjadi sumber keuangan bagi negara-negara dari masa lalu hingga saat ini. *Seigniorage* dapat memberikan setidaknya seperempat dari anggaran saat ini (Leen, 2011, 1). Ia merupakan pajak tidak langsung/ terselubung (inflasi dan *seigniorage*) yang dirasakan terus menerus dengan turunnya nilai mata uang kertas. (Saidi, 2007:, 54)

Dalam penelitian Hochreiter, dkk, di beberapa negara di dunia menemukan bahwa *seigniorage* sebagai bagian dari produk domestik bruto (PDB) adalah sekitar 30% di Rumania, 4% di Hongaria, 1% untuk Republik Ceko, Austria dan Jerman pada tahun 1993. Di negara-negara Eropa Selatan, umumnya rasio

*seigniorage* bervariasi antara dua sampai dengan empat persen, (Hochreiter, Rovell and Winckler, 1996: 429-643) bandingkan (Horrendorf, 1997: 1-4). Sementara di negara-negara berkembang dan tertinggal, dikarenakan keterbelakangan pasar keuangan domestik dan pembatasan valuta asing, pemerintah sulit membiayai defisit anggaran melalui sumber selain monetisasi (pencetakan uang) dengan memanfaatkan keuntungan *seigniorage*. (Adenuts, 2012: 2). Bahkan dalam penelitian Davies menunjukkan bahwa negara-negara yang sedang terjebak dalam perang selalu meningkatkan *seigniorage* dengan cara menambah pertumbuhan uang untuk membiayai perang, artinya *seigniorage* sangat tinggi saat perang dari pada pasca atau sebelum perang. (Davies, 2007: 13). Al-Maqrizy juga menemukan bukti pada abad keempat Masehi bahwa adanya kerusakan moneter yang bersumber dari kebijakan pemerintah menggunakan *fulus*/uang fiat secara berlebihan untuk menutupi anggaran belanja negara. *Fulus* juga disalahgunakan para penguasa untuk kepentingan mereka berfoya-foya dan korup. (al-Maqrizy, 1956: 80).

Namun, inflasi sangat berperan sebagai restriksi kebijakan pemerintah dalam memperoleh pendapatan dari pencetakan uang baru termasuk pendapatan *seigniorage*. Jika pemerintah mencetak uang dengan cara berlebihan maka akan berdampak pada tingkat inflasi yang tinggi dan pendapatan *seigniorage* akan menurun dikarenakan turunnya nilai uang tersebut. Davies menyebutkan kebijakan *seigniorage* tergantung pada bagaimana ekspektasi

inflasi yang terbentuk, tingkat dan pertumbuhan pendapatan. Pertumbuhan pendapatan juga meningkatkan opsi pembiayaan pemerintah dengan meningkatkan basis pajak konvensional, sehingga berpengaruh pada keseluruhan ambiguitas *seigniorage*. (Davies, 2007: 2). Bahkan ada konsensus luas di kalangan ekonom bahwa inflasi yang tinggi sering disebabkan oleh kebutuhan pemerintah menaikkan *seigniorage* untuk membiayai defisit anggaran yang tinggi. "Tergantung pada bentuk dari fungsi permintaan uang. (Easterly, 1992: 1). Hal ini barangkali sesuai dengan pendapat Friedman bahwa tingkat peredaran uang dengan inflasi sangat kuat. Proposisi ini dibuktikan oleh Friedman dalam beberapa hasil penelitiannya di berbagai negara. Proposisi ini mengatakan bahwa jika tingkat peredaran uang melebihi kapasitas transaksi itu sendiri maka akan terjadi hiperinflasi. Karena itulah Friedman menyarankan pengendalian peredaran uang agar tetap stabil. (Friedman, 2002: 86). Mishkin dalam *inflation targeting framework*, juga menyebutkan bahwa inflasi akan dapat ditekan dengan cara mempengaruhi uang beredar pada publik. Sedangkan instrumen yang digunakan untuk mempengaruhi tingkat uang beredar adalah kebijakan suku bunga. (Mishkin, 2006: 501)

Mannan menegaskan bahwa prinsip fundamental yang harus selalu diperhatikan dalam proses produksi adalah prinsip kesejahteraan ekonomi, (Mannan, 1997: 54). Seperti halnya produksi mata uang seharusnya tidak melulu dicetak atau diciptakan hanya untuk kepentingan

politis semata untuk memenuhi kebutuhan pengeluaran negara dengan cara memeras rakyatnya, namun lebih dari itu adanya keseimbangan yang adil antara apa yang diciptakan dengan kebutuhan ekonomi masyarakat. Faktanya, produksi uang melalui cara *seigniorage* yaitu selisih antara ongkos penciptaan uang dengan nilai uang merupakan sesuatu yang tidak adil. Nilai intrinsik yang terkandung dalam mata uang tidak seimbang dengan nilai komoditas yang didapatkannya. Suatu negara melalui bank sentralnya menciptakan uang atau mata uang dengan ongkos yang sangat murah, sekitar 0,2% dari total nilai yang tertera dalam uang. Artinya dengan nilai yang tidak seimbang 0,2% bank sentral telah mengambil keuntungan 99,8% dari nilai total uang yang diciptakan kemudian diedarkan kepada masyarakat. Sementara di sisi lain masyarakat untuk mendapatkan selembar uang kertas sangat sulit dan butuh bekerja keras, (Asyari Hasan, 2014: 157). Produsen haruslah memiliki kepedulian terhadap kepentingan orang lain, bukan hanya mementingkan dirinya sendiri dengan hanya memaksimalkan keuntungan semata. Sebagaimana diketahui bahwa mencipta barang-jasa itu harus dilihat kehalalan dalam setiap tahapan produksi, juga bagi produsen haruslah memproduksi barang yang bernilai masalah bukan barang yang membawa mudharat bagi konsumen. (Mannan, 1970: 300)

### **PREPOSTEROUSLY UNEQUAL (KESEIMBANGAN YANG TIDAK MASUK AKAL)**

Dalam rezim ekonomi dunia saat ini negara-negara berkembang sangat dirugikan akibat monopoli *seigniorage* negara-negara pemilik mata uang kunci. Tindakan sadar dan sistematis berupa pengambilalihan kekayaan via "konsep legal" dan akan menjadi transaksi tidak sah jika dilakukan sebaliknya. Dengan kekuatan *seigniorage* sumber daya negara-negara berkembang telah dirampas, salah satu contoh adalah jika Amerika Serikat membeli minyak mentah dari Indonesia dengan menggunakan uang kertas yang baru diedarkan, maka AS akan mendapatkan keuntungan yang luar biasa. Sebab, Indonesia akan memberikan minyak yang didapatkan melalui proses yang sangat panjang, kerja keras dan investasi besar. Sementara sebagai gantinya Indonesia hanya akan mendapatkan catatan akuntansi elektronik yang tercantum dalam beberapa komputer. Memang orang Indonesia tidak akan merasa kehilangan sesuatu karena pada saat yang bersamaan dengan uang tersebut bisa membeli barang maupun jasa, akan tetapi kenyataannya AS sanggup mendapatkan minyak hanya dengan kertas yang disulap dengan angka-angka. (Meera, 2010: 48).

Ada empat keuntungan Amerika Serikat yang didapatkan dari monopoli mata uang dunia yaitu: *pertama* adalah potensi *seigniorage*, memperluas sirkulasi mata uang melintasi batas negara menghasilkan setara dengan utang subsidi atau bebas bunga dari luar

negeri merupakan suatu transfer implisit keuntungan nyata, seperti dalam catatan Federal Reserve bahwa arus bunga tabungan dari peredaran Dollar di negara lain yang dihitung secara konservatif adalah sekitar 16-22 triliun Dollar per tahun. *Kedua*, keleluasaan yang tinggi dalam kebijakan makroekonomi yang diberikan sebagai hak istimewa agar bisa menggantungkan nasibnya kepada si pemilik uang dalam membantu membiayai defisit asing. *Ketiga*, lebih bersifat psikologis adalah keuntungan dari status dan prestise yang berlaku dengan dominasi pasar. Uang telah lama memainkan peran kunci simbolis bagi pemerintah yang berfungsi seperti halnya bendera, lagu kebangsaan dan prangko sebagai sarana untuk menumbuhkan rasa kekhasan identitas nasional. Tapi peran penting tersebut tergerus seiring dengan digantikannya mata uang lokal oleh uang asing lebih populer, terutama uang seperti Dollar yang begitu banyak digunakan setiap hari. Masyarakat luas terus-menerus mengingatkan peringkat tinggi Amerika dalam berbagai komunitas bangsa-bangsa. "*Great Powers Have Great Currencies*", akibatnya Dollar telah menjadi kuat sebagai simbol keunggulan AS. Dan terakhir adalah keuntungan besar sebagai kekuatan geopolitik yang berasal dari ketergantungan orang lain terhadap moneter. Hal ini dapat digunakan sebagai sarana untuk mencapai tujuan-tujuan luar negeri tanpa kendala atau bahkan untuk digunakan sebagai alat pemaksaan internasional. (Brawly, 1998: 170).

*Bureau of Engraving and Printing Federal Reserve* menyebutkan bahwa

dalam mencetak uang Dollar AS biaya produksi yang dibutuhkan per lembarnya 4,2 sen \$ (dengan nilai nominal berapapun). Jika nominalnya 1 \$, maka nilai nominalnya menjadi 24 kali lipat lebih besar dari nilai intrinsiknya, sementara nilai nominal 10 \$ akan menjadi 240 kali lipat dari nilai intrinsiknya. Permasalahannya menjadi semakin besar dan kompleks ketika uang kertas berubah fungsi dari alat bayar menjadi suatu barang yang diperjualbelikan. (Pujiyono, 2004: 145) Dengan kata lain *seigniorage* yang dikantongi oleh the Fed per 1 \$ sama dengan 95,8 sen (1 \$ dikurangi 4,2). Sementara 3 miliar jiwa di dunia hidup bersusah payah hanya untuk mendapatkan 2 \$ sehari. Ini bukan keadilan tapi eksploitasi, perampokan dan penzaliman. (Amin, 2009: 120). Kenyataan ini merupakan sesuatu yang *preposterously unequal* (keseimbangan yang tidak masuk akal), selisih antara nilai pembuatan mata uang dengan nilai nominal yang sangat tidak seimbang dan tidak adil (Hasan, 2014: 160).

Dollar AS yang beredar di dunia saat ini sekitar 33 miliar lembar. Sekitar 9 miliar lembar merupakan denominasi 100 \$, sisanya berupa denominasi 50 \$, 20 \$, 10 \$, dan 5 \$. Dalam 30 tahun terakhir nilai uang Dollar AS yang beredar di dunia naik 700% dari 150 miliar \$ menjadi 1,16 triliun \$. (Kompas, 2013: 17). Dari jumlah ini sangat luar biasa keuntungan yang diperoleh AS dan betapa dahsyat perampokan yang dilakukannya terhadap sumber daya dunia.

## KEADILAN VS KEZALIMAN MONETER

Keadilan (*'adl*), merupakan nilai paling asasi dalam ajaran Islam, yaitu menegakkan keadilan dan menghindari kezaliman merupakan tujuan utama bagaimana termaktub dalam al-Qur'an surah, al-Hadid, 57: 25. Keadilan merupakan nilai utama atau tertinggi (*the primary of justice*) dalam kehidupan manusia, terutama dalam berbagai bentuk sistem dan penerapan ekonomi. Seperti disebutkan oleh Sayid Qutub keadilan merupakan unsur pokok yang komprehensif dan terpenting dalam semua aspek kehidupan. Ia tidak hanya sekedar utama di antara yang utama namun merupakan prioritas dan nilai utama. Keadilan mengajarkan bahwa kualitas hidup manusia akan tercapai jika penerapan keadilan dilakukan dalam semua bidang kehidupan. Padahal suatu pemerintah dalam konsepsi Islam dituntut memiliki tanggung jawab besar dalam memberikan keadilan bagi masyarakat. Di antaranya adalah membuat peraturan dan kebijakan yang dapat mewujudkan keadilan dan menghilangkan kezaliman, menyebarkan keadilan dan memantapkan stabilitas. (al-Qardhawi, 2003: 57), Setidaknya terdapat empat makna keadilan yang sekaligus menjadi tujuan dari keadilan itu sendiri, yaitu: sama, seimbang, perhatian kepada hak-hak individu dan memberikan hak-hak itu kepada setiap pemiliknya dan adil yang dinisbatkan kepada Allah. (Shihab, 1996; 110). "adil maksudnya supaya tiap-tiap orang dalam masyarakat diperlakukan secara sama oleh negara dalam segala rupa dan bebas dari tindakan kezaliman. (Swasono

dan Ridjal (eds.), 1992: 179). Negara harus memperlakukan mereka secara sama, termasuk dalam bidang ekonomi, baik produksi, distribusi maupun konsumsi. Namun keadilan tidak akan bisa tegak kalau di dalamnya masih ada praktek-praktek penjajahan dan atau eksploitatif serta hal-hal yang membawa kepada pelanggaran hak-hak orang lain.

Memang konsep adil sesungguhnya tidak hanya dimiliki oleh Islam, kapitalisme dan sosialisme sebagai sistem ekonomi yang banyak dipakai di dunia juga memiliki dan menerapkan sistem adil, demikian juga bagi masyarakat integralistik. Namun ada perbedaan konsep antara sistem tersebut. Dalam pandangan kapitalisme klasik, adil adalah "anda mendapatkan dari apa yang anda upayakan" (*you get what you deserved*), sosialisme klasik memaknainya dengan "sama rasa sama rata" (*no one has a privilege to get more than others*), sedangkan dalam Islam adalah "tidak menzalimi dan tidak dizalimi" (*la tazlimun wa la tuzlamun*). (Karim, 2007: 35-36)

Al-Maududi (1903-1979) mengatakan bahwa konsep kesejahteraan melalui pendekatan kebijakan ekonomi Islam adalah sebuah kebijakan peraturan yang dapat dipakai sebagai pedoman dan dasar dalam menentukan arah dan pola perekonomian umat secara berkelanjutan, kebijakan perekonomian dalam Islam ditempatkan pada dasar kebijakan secara global, karena masalah perekonomian mudah untuk berubah sesuai dengan kondisi lingkungan alam dan waktu pada jamannya, sedangkan untuk hal-hal yang baku Islam menentukan pedoman secara rinci. (Amalia, 2005: 235)

Dalam hal ini Syekh Muhammad Abduh (w.1323/ 1905) memandang kezaliman atau ketidakadilan, sebagai kemungkaran yang paling buruk (*aqbah al-munkarat*) dalam kerangka nilai-nilai Islam. (Ridha, 1954: 45). Islam dengan tegas dalam menegakkan tujuannya menghapuskan semua bentuk kezaliman (*zulm*) dari masyarakat manusia, yang merupakan istilah komprehensif Islam untuk mengacu semua bentuk ketidakadilan, ketidakmerataan, eksploitasi, penindasan, dan kekeliruan, sehingga seseorang tidak memenuhi kewajibannya terhadap mereka. (Chapra, 1985: 27-28). Chapra, mengatakan bahwa suatu perekonomian dapat dikatakan telah mencapai pemerataan (keadilan) optimal jika barang dan jasa yang diproduksi dapat didistribusikan dalam suatu cara di mana kebutuhan individu (tanpa memandang apakah ia kaya atau miskin, pria atau wanita, muslim atau non muslim) telah dapat dipenuhi dengan memadai dan juga terdapat distribusi kekayaan dan pendapatan yang adil tanpa berdampak buruk pada motivasi kerja, menabung, investasi, dan melakukan usaha. (Chapra, 2000: 57).

Mencari kekayaan sangat penting dalam kehidupan individu dan masyarakat, di mana kestabilan hidup individu dan masyarakat tidak akan tercapai melainkan dengan kekayaan (Ibnu 'Ashur, 1418/1998: 325-326). Sebab kekayaan merupakan karunia Allah dan kebaikan yang diperintahkan untuk dicari serta diproduksi, setelah menunaikan ibadah kepada Allah seperti disebutkan dalam al-Qu'an, surah al-Jumu'ah: 62,10. Namun dalam mencari kekayaan tersebut harus

dilakukan dengan cara-cara yang benar, halal dan tentunya baik, bukan dengan merampok, menindas dan mencuri harta orang lain. Sebagai ajaran yang komprehensif al-Qur'an dan al-Sunnah, memuat banyak suruhan, perintah, serta pedoman bagi manusia untuk mencukupi kebutuhan hidupnya, menjalankan produksi barang dan jasa, serta mendistribusikan kesejahteraan dan pendapatan.

Bukan sesuatu yang seimbang dan adil jika negara dalam memproduksi mata uang mengambil keuntungan hampir 100% atau hampir tidak menggunakan biaya sama sekali dengan hanya secara politik uang kertas dijadikan legal. Uang kertas sama sekali tidak memiliki nilai instrinsik dan hanya berguna jika masyarakat menggunakan dan memberikan kepercayaan padanya memutuskan uang kertas sebagai alat penyimpan harta sekaligus alat transaksi. Sementara masyarakat seperti saja seorang petani padi, untuk menghasilkan padi, ia perlu bekerja keras, banting tulang, mempersiapkan bibit, pupuk, dan obat-obatan pembasmi hama serta penuh sabar menunggu masa beberapa bulan untuk panen dan menghasilkan gabah padi. Setelah panen, gabah kemudian dijual agar memperoleh uang yang digunakan untuk membeli kebutuhan sandang maupun pangan. Sementara bank sentral menciptakan uang dengan mudah, hanya dengan modal beberapa rim kertas lalu menciptakan uang dengan biaya dan kerja yang sedikit (produksi), tanpa perlu menunggu lama, kemudian uang tersebut diedarkan melalui bank-bank dengan bunga tinggi, lalu

hasilnya kemudian dimanfaatkan oleh bank sentral untuk membiayai kebutuhan-kebutuhannya. (Hasan, 2014: 162)

Nilai intrinsik dan komoditas uang yang berbeda hanya menguntungkan pihak-pihak tertentu, yaitu; perbankan komersial melalui penyediaan sejumlah pelayanan perbankan gratis dan para peminjam istimewa dari bank lewat suku bunga yang rendah. Sementara kerugian masyarakat adalah perbedaan ongkos peluang dari penciptaan uang kepada masyarakat dan laju suku bunga primer, dan orang miskin serta perusahaan publik non bank tidak mendapatkan manfaat langsung dari penciptaan ini. (Chapra, 2000: 54). Dalam hal ini pemerintah terkesan menyembunyikan keuntungan yang diperoleh dari selisih nilai intrinsik mata uang, demi memperoleh keuntungan lebih. Padahal seperti disebut al-Ghazali perbuatan menyembunyikan takaran dan timbangan sesuatu (termasuk mata uang) adalah perbuatan yang dilarang dan zalim. (Al-Ghazali, 1987: 85). Perbuatan mengakibatkan munculnya fenomena *economic bubling* yang pada titik tertentu merupakan bencana ekonomi. Bencana yang dalam perspektif teologis diakibatkan menyembunyikan takaran dan pengambil sesuatu yang bukan hak termasuk *seigniorage* berpengaruh pada dicerainya prinsip keadilan dan kebenaran. Perbuatan tersebut jelas tidak adil dan tidak benar karena bertentangan dengan keniscayaan korelasi antara kerja dan hasil (*work and result*) dengan masalah sebagai keniscayaan implikatifnya.

Dalam sistem Islam, keadilan dan keseimbangan dalam ekonomi

merupakan sesuatu yang mutlak, sedangkan eksploitasi, kecurangan dan pemaksaan harus dihapuskan. Islam melarang segala bentuk pengumpulan dan peningkatan kekayaan dengan cara-cara yang tidak adil "*akhdul amwal bil bathil*". (Asyari Hasan, 2014: 164). Allah menjelaskan dalam surah an-Nisa' ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ  
بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

*Wahai orang-orang yang beriman! janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan atas dasar suka sama suka di antara kamu. (Q.S. an-Nisa' [4]: 29)*

Dengan redaksi yang sama dalam surah al-Baqarah ayat 188 yang sama disebutkan:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ

*Dan janganlah kamu makan (atau mengambil) harta (orang-orang lain) di antara kamu dengan jalan yang salah...(Q.S. al-Baqarah [2]: 188)*

Dalam konsep Islam seperti disebutkan oleh Jalaluddin bahwa memproduksi apapun, termasuk dalam proses produksi pencetakan uang suatu negara yang kemudian didistribusikan kepada masyarakat harus memenuhi dua kriteria yaitu: tidak adanya eksploitasi dalam proses produksi dan tidak menggunakan cara-cara yang dilarang untuk mengejar kekayaan secara sepihak. (Jalaluddin, 1991: 58). Al-Qur'an dengan tegas mengancam segala perbuatan kecurangan dalam takaran dan timbangan seperti

disebutkan dalam surah al-Muthaffifin ayat 1 yang berbunyi:

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ

*Celakalah bagi orang-orang yang curang (dalam menakar dan menimbang) (Q.S. al-Muthaffifin [83]: 1)*

Salah satu peningkatan kekayaan yang tidak diperbolehkan adalah menerima keuntungan moneter dalam transaksi bisnis tanpa memberikan imbalan yang setimpal dan adil. (Chapra, 1997: 20). Padahal prinsip keadilan harus diimplementasikan dalam segala dimensi kehidupan termasuk ekonomi dan jika tidak dilakukan maka penindasan, kekerasan serta eksploitasi, akan terus berlangsung. (Hamid, 2007: 64). Pengumpulan kekayaan hanya boleh dengan tujuan untuk kesejahteraan masyarakat secara umum sehingga tidak ada salah satu pihak yang diuntungkan (*better-off*) dengan jalan merugikan pihak yang lain (*Worse-off*). Ibn Khaldun menegaskan bahwa nilai suatu produk sama dengan jumlah tenaga kerja yang dikandungnya, sebagian hasilnya yang diperoleh seseorang melalui usaha dan tenaganya disebut keuntungan. Seberapa besar manusia itu berusaha itulah yang akan mereka hasilkan, demikian juga kekayaan negara tidak ditentukan oleh jumlah uang yang dimiliki bangsa tersebut, tetapi ditentukan oleh produksi barang dan jasa serta neraca pembayaran yang sehat yang merupakan suatu konsekuensi alam dari tingkat produksi yang tinggi. (Ibn Khaldun, 2001: 449)

Dapat dikatakan bahwa *seigniorage* dalam sistem mata uang

kertas tidak dibenarkan dalam sistem ekonomi berkeadilan seperti halnya ekonomi Islam dikarenakan:

1. Berlawanan dengan *maqasid as-shari'ah*;
2. *Seigniorage* yang diperoleh dari uang kertas adalah riba mendalam; (Meera and Larbani, 2004: 3)
3. Perbuatan *seigniorage* merupakan pencurian dan perampasan dengan cara yang halus oleh otoritas moneter suatu negara terhadap masyarakatnya dan perampokan suatu negara terhadap negara lainnya; (Meera, 2010: 72)
4. Bertentangan dengan prinsip keadilan dan keseimbangan.
5. Bermuara pada distabilitas ekonomi yang diakibatkan oleh ketimpangan sosial ekonomi;
6. *Seigniorage* juga menjadi alat kebatilan yang dilakukan oleh suatu negara terhadap rakyatnya sendiri dengan paksa. (Hasan, 2004: 161).

## PENUTUP

Dari tulisan ini nampak jelas bahwa sistem *fiat money* yang mengacu pada penggunaan *seigniorage* sangat tidak adil bagi masyarakat yang menggunakannya dan bertentangan dengan konsep keseimbangan serta kejujuran dalam produksi. Dapat disimpulkan penggunaan *seigniorage* bertentangan dengan ajaran-ajaran ekonomi Islam. Namun walaupun begitu sistem ini telah mengakar dan membudaya pada ranah ekonomi dunia. Dan datangnya sistem ekonomi Islam diharapkan adanya gagasan "*shifting paradigm*" sebagai alternatif. Sistem moneter Islam menginginkan suatu

keseimbangan dalam penciptaan uang. Cara-cara eksploitatif dan mengambil harta masyarakat melalui *seignorate* harus dihindari karena mencederai keadilan yang merupakan sesuatu yang sangat asasi dalam

ekonomi. Segala kegiatan ekonomi harus diatur sedemikian rupa sehingga semua pihak-pihak merasa diuntungkan melalui cara-cara yang benar.

## DAFTAR PUSTAKA

- 'Ashur, Ibn, 1418/1998. *Maqashid al-Shari'ah al-Islamiyyah*, Beirut: al-Bashair li al-Intaj al-'Ilmiy,
- Adenuts, Deodat E. 2012. "The Policy Dilemma of Economic Openness and Seigniorage-Maximizing Inflation in Dollarised Developing Countries: The Ghanaian Experience", *MPRA Paper* No. 37134, 6 March : 91-129
- Ahmad, Abu Umar Faruq and Hassan, M. Kabir. 2006. "The Time Value of Money Concept in Islamic Finance", *The American Journal of Islamic Social Sciences*, vol. 23, No.1. : 66-89
- Aisen, Ari And Veiga, Francisco José. 2007. "The Political Economy of Seigniorage", *IMF Working Paper*, No. 05/175, 18 December : 29-50
- Amalia, Euis. 2005. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Jakarta : Pustaka Asatruss
- Amin, A. Riawan. 2009. *Satanic Finance*, Jakarta: Senaya Abadi.
- Baba, Insah and Kenneth, Ofori Boateng. 2013. "Seigniorage Revenue and Inflation in the Ghanaian Economy", *African Journal of Social Sciences*, Volume 3 Number 1: 20-30
- Brawly, Mark R. 1998. *Turning Points: Decisions Shaping the Evolution of the Internastional Political Economy*. Canada; Broadview Press, ltd.
- Buiter, Willem H, 2007. "Seigniorage", *E-Journal* No. 2007-10 July 25.
- Chapra, Umar, *Monetary Policy in an Islamic Economy in Money and Banking in Islam*. Jeddah: International Center for Research in Islamic Economics, 1996
- , *The Future Of Economics: An Islamic Perspektive*, London; The Islamic Foundation, UK. ,2000,
- Davies, Victor A.B. 2007. "Seigniorage and Civil War" Paper prepared for presentation at conference on Economic Development in Africa, 18-20 March 2007, St Catherine's College, Oxford; organized by Centre for the Study of African Economies (CSAE), University of Oxford
- Easterly, William and others. 1992. "Money Demand Function and Seigniorage Maximizing Inflation", Country Economics Department, The World Bank November, 1992 WPS number 1049
- Friedman, Milton and Ghodart, Charles H. ed, 2002. *Money, Inflation and Constitutional Poetion of Central Bank*, London:

- the Institute of Economic Affairs,
- Al-Ghazali, Abu Hamid Muhammad bin Muhammad., 1987. *Ihya' 'Ulum ad-Din Qahirah: Dar ad-Diyalili at-Turath*.
- Hasan, Asyari. 2014. *Penyederhanaan Mata uang dalam Axioma Ekonomi Islam*, Batusangkar: STAIN Press.
- Helfferrich, Karl. 1969. *Money*, Lotus Infield, trans. New York: Augustus M. Kelley Pub.
- Hochreiter, Eduard, Rovelli, Riccardo and Winckler, Georg, 1996. "Central Banks and Seigniorage: a Study of Three Economies in Transition", *European Economic Review (Papers and Proceedings)*, 40 : 629-643.
- Horrendorf, B., 1997. "Time Consistent Collection of Optimal Seigniorage: a Unifying Framework," *Journal of Economic Surveys*, 11(1) March: 1-4
- Hamid, Arifin. 2007. *Hukum Ekonomi Islam di Indonesia*, Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia.
- Ibnu Khaldun 'Abdurahman, 2001. *Muqaddimah Li Tarikh Ibnu Khaldun*, ed. Ali Abdul Wahid Wafi'. Beirut: Dar al-Fikr, Mathba'ah alNashr wa al-Tauji'
- Jalaluddin, Abul Khair Mohd. 1991. *The Role of Government in an Islamic Economic*, Kuala Lumpur: A.S. Noordeen G.P.O.
- Karim, Adiwarmarman. 2006. *Ekonomi Mikro Islami*, Jakarta: PT Radja Grafindo Persada.
- Kompas, 24 Oktober 2013, "Mata Uang Desain Baru 100 Dollar AS diperkenalkan ke Pasar".
- Leen, A.R., 2011. "Seigniorage: A New Revenue for the European Union, in 'Seigniorage, its history, its present, and its future for the European Union", *Archives of Economic History*, Volume XXIII, No 1, (January-June): 7-16
- Mannan, M.A., 1997. *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa.
- , 1984. *The Making of Islamic Economics Society*. Kairo: Muassasah al-Risalah.
- , 1995. *Islamic Economics Theory and Practice*. New Delhi: SH. M. Ashraf Publisher.
- Maqrizi, 1957. *al-Ighathah al-Ummah bi Kashfi al-Ghummah*. Qahirah: Matba'ah Li al-Jannah.
- McEachern, William A. 2000. *Economics: a Contemporary Introduction*, terj. Sigit Triandaru, Jakarta: Salemba Empat.
- Meera, Ahamed Kameel Mydin and Larbani, Moussa. 2004. "Seigniorage of Fiat Money and the Maqāsid al-Sharī'ah: the Unattainableness of the Maqāsid", Part I: 1-28
- Meera, Ahameed Kameel Mydin, 2010. *Perampok Bangsa-bangsa: Mengapa Emas Harus Jadi Mata Uang Internasional*. Diterjemahkan oleh Yulizar Djamaluddin Sanrego, Jakarta: Mizan.
- Mishkin, Frederic S, 2006. *The Economic of Money, Banking and Finacial Market*, Boston: Pearson Addison Wasley.

- Mușetescu Radu Cristian and Jora, Octavian-Dragomir, 2012. "The Theory of Political Monetary (Dis)Integration: a Minority Report from the Perspective of Austrian Economics", *Romanian Journal of European Affairs*, Vol. 12, No. 4, December.
- Pujiyono, Arif, 2004. "Dinar dan Sistem Standar Tunggal Emas Ditinjau Menurut Sistem Moneter Islam", *Dinamika Pembangunan*, Vol. 1 No. 2 / Desember.
- Al-Qardhawi, Yusuf, 2003 *Fatawa Mu'asiroh*, Kuwait: Da>r al-Qalam li an-Nashri wa at-Tauzi'.
- Ridwan, M., 2012. *Dinar Dirham Vs Bank Islam Mencari Titik Temu Pro dan Kontra Dalam Ekonomi Islam*, Jakarta: Safira Press dan Iqtishad Consulting.
- Saidi, Zaim, 2007. "Islam, Kapitalisme, dan Filantropi", *Galang: Jurnal Filantropi dan Masyarakat Madani*, Vol. 2 no. 2 April.
- Shihab, Quraisy. 1996. *Wawasan al-Qur'an*, Bandung: Mizan.
- Swasono, Sri-Edi dan Ridjal, Fauzie (eds.). 1992. *Mohammad Hatta, Demokrasi Kita, Bebas Aktif, Ekonomi Masa Depan*, Jakarta: UI Press, Edisi 2, cetakan I.